

TINJAUAN HUKUM TERHADAP REGULASI DAN PENGAWASAN LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE (STUDI KASUS GRAB DI INDONESIA)

Sonya Hermina Kusumaning Maruru¹, Tri Lestari², Dwi Imroatus Sholikhah³, Tegar Harbriyana Putra⁴, Mohammad Fauzan Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Boyolali

ABSTRACT

This research examines the legal framework that regulates and supervises online transportation services in Indonesia, with a special focus on Grab as a case study. Online transportation services such as Grab have become a popular choice among urban communities, but their existence raises various legal issues that require effective regulation and supervision. This research analyzes existing regulations, their implementation, and their impact on various stakeholders, including drivers, passengers, and the companies themselves. Using a qualitative approach and case study method, data was obtained through literature study, analysis of legal documents, and interviews with related parties. The research results show that despite a comprehensive regulatory framework, there are still challenges in implementation and supervision that require further attention. This research provides recommendations for improving regulations and supervision, as well as suggestions for Grab to improve compliance and service quality.

Keywords : *Transportation Law, Online Transportation, Grab, Regulations, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kerangka hukum yang mengatur dan mengawasi layanan transportasi online di Indonesia, dengan fokus khusus pada Grab sebagai studi kasus. Layanan transportasi online seperti Grab telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat perkotaan, namun keberadaannya menimbulkan berbagai isu hukum yang memerlukan regulasi dan pengawasan yang efektif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang ada, implementasinya, serta dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengemudi, penumpang, dan perusahaan itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka regulasi yang komprehensif, masih ada tantangan dalam implementasi dan pengawasan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan pengawasan, serta saran bagi Grab dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan.

Kata Kunci : *Hukum Transportasi, Transportasi Online, Grab, Regulasi, Indonesia*

PENDAHULUAN

Transportasi online telah mengubah wajah sistem transportasi di banyak negara, termasuk Indonesia. Layanan ini menawarkan solusi praktis dan efisien bagi masyarakat perkotaan yang sering menghadapi masalah kemacetan dan keterbatasan transportasi publik. Grab, sebagai salah satu pelopor layanan transportasi online di Indonesia, telah memperoleh popularitas yang signifikan sejak pertama kali diluncurkan. Kemudahan akses melalui aplikasi smartphone, fleksibilitas dalam memilih moda transportasi, serta berbagai promosi menarik menjadi daya tarik utama bagi pengguna.

Kemunculan layanan transportasi online seperti Grab juga membawa berbagai tantangan, terutama dalam aspek regulasi dan pengawasan. Perkembangan teknologi dan model bisnis yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan kecepatan dalam pembentukan regulasi yang sesuai. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, termasuk persaingan tidak sehat dengan transportasi konvensional, keamanan dan keselamatan penumpang, serta hak dan kewajiban para pengemudi. Regulasi yang ada sering kali belum mampu mengakomodasi seluruh aspek operasional layanan transportasi online ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan berbagai peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berbagai peraturan Menteri Perhubungan menjadi dasar hukum utama bagi operasional transportasi online. Namun, pelaksanaan dan pengawasan regulasi ini masih menghadapi banyak kendala. Berbagai kasus pelanggaran hukum dan ketidakpuasan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa efektivitas regulasi tersebut masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, isu mengenai status hukum pengemudi transportasi online juga menjadi perhatian penting. Pengemudi Grab, misalnya, berada dalam posisi yang ambigu antara sebagai pekerja mandiri dan sebagai bagian dari perusahaan. Hal ini menimbulkan berbagai perdebatan mengenai hak-hak tenaga kerja, perlindungan sosial, dan tanggung jawab hukum perusahaan terhadap para pengemudinya. Kesimpangsiuran status hukum ini memerlukan kejelasan regulasi yang dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam regulasi dan pengawasan layanan transportasi online di Indonesia dengan fokus pada studi kasus Grab. Penelitian ini akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari regulasi yang ada, mengevaluasi implementasinya, serta dampaknya terhadap berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki regulasi dan pengawasan, serta bagi perusahaan transportasi online dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan pihak terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai regulasi dan pengawasan layanan transportasi online, khususnya dalam konteks operasional Grab di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan regulasi yang lebih efektif dan adil bagi

semua pihak yang terlibat. Penulis menggunakan metode studi kasus agar dapat fokus pada Grab sebagai studi kasus utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang berlaku mengatur layanan transportasi online di Indonesia

Regulasi layanan transportasi online di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur berbagai aspek transportasi termasuk operasional kendaraan bermotor di jalan raya. Undang-undang ini menjadi landasan bagi regulasi spesifik terkait transportasi online, memastikan bahwa layanan ini beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur operasional layanan transportasi online. Salah satu yang signifikan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Peraturan ini menetapkan berbagai ketentuan, mulai dari persyaratan teknis dan administratif untuk penyedia layanan, hingga aspek keamanan dan keselamatan penumpang. Peraturan ini dibuat untuk menjamin bahwa layanan transportasi online beroperasi dengan standar yang memadai dan melindungi kepentingan penumpang.

Regulasi mengharuskan penyedia layanan transportasi online seperti Grab untuk memperoleh lisensi dan izin operasi yang sah. Perusahaan harus mendaftarkan armadanya dan memastikan bahwa semua kendaraan memenuhi standar teknis dan operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, pengemudi juga diwajibkan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sesuai dan sertifikat uji KIR untuk kendaraannya. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengaturan tarif menjadi aspek penting dalam regulasi transportasi online. Pemerintah menetapkan tarif batas atas dan bawah untuk memastikan persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalam berbagai keputusan menteri dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Perusahaan seperti Grab harus menyesuaikan tarifnya sesuai dengan regulasi ini untuk menghindari praktik predatory pricing dan menjaga keberlanjutan bisnis. Dengan adanya regulasi tarif, diharapkan tidak terjadi persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen maupun penyedia layanan.

Regulasi juga menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan penumpang. Penyedia layanan wajib memastikan bahwa semua kendaraan dilengkapi dengan fitur keselamatan yang memadai dan pengemudi telah mendapatkan pelatihan yang tepat. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan bahwa penumpang mendapatkan layanan yang aman dan nyaman. Aspek keselamatan dan keamanan ini sangat penting mengingat tingginya penggunaan layanan transportasi online dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Perlindungan konsumen menjadi salah satu fokus utama dalam regulasi transportasi online. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Penyedia layanan seperti Grab wajib menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai tarif, rute, dan layanan. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa juga harus disediakan untuk menangani

keluhan konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen yang baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi online dapat meningkat.

Status hukum pengemudi transportasi online sering kali menjadi perdebatan. Regulasi mengakui pengemudi sebagai mitra independen, bukan sebagai karyawan perusahaan. Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengemudi, termasuk kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan standar layanan yang ditetapkan oleh perusahaan. Perlindungan sosial bagi pengemudi juga menjadi perhatian, dengan beberapa inisiatif untuk menyediakan asuransi dan manfaat lainnya. Status ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi pengemudi sambil tetap memastikan adanya perlindungan yang memadai.

Penggunaan teknologi dan manajemen data dalam layanan transportasi online juga diatur oleh regulasi. Perusahaan seperti Grab harus memastikan bahwa sistem aplikasi mereka memenuhi standar keamanan informasi dan privasi pengguna. Peraturan terkait perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan terkait lainnya, yang mengharuskan perusahaan untuk melindungi data pribadi penumpang dan pengemudi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan dan mencegah penyalahgunaan data. Penyedia layanan transportasi online juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lokal. Setiap daerah mungkin memiliki ketentuan tambahan yang mengatur operasional transportasi online, seperti zona operasi, tempat parkir khusus, dan kontribusi terhadap anggaran daerah. Kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah penting untuk memastikan operasional yang lancar dan sesuai hukum. Hal ini juga dapat membantu dalam penanganan masalah spesifik yang mungkin muncul di berbagai daerah.

Regulasi yang mengatur layanan transportasi online di Indonesia terus dievaluasi dan disesuaikan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah secara berkala melakukan revisi dan pembaruan peraturan untuk mengatasi masalah yang muncul dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Proses ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan transportasi online, pengemudi, dan konsumen, untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan adil. Dengan adanya evaluasi dan penyesuaian regulasi yang berkelanjutan, diharapkan layanan transportasi online dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Regulasi yang berlaku untuk layanan transportasi online di Indonesia dirancang untuk mengatur berbagai aspek operasional, termasuk lisensi, tarif, keselamatan, perlindungan konsumen, dan status hukum pengemudi. Meski demikian, tantangan dalam implementasi dan pengawasan menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian regulasi yang berkelanjutan. Dengan regulasi yang efektif dan adil, diharapkan layanan transportasi online dapat berkembang secara sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Implementasi Regulasi

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap layanan transportasi online di Indonesia merupakan aspek yang krusial untuk memastikan operasional yang aman dan sesuai dengan regulasi. Meskipun regulasi telah diterapkan secara menyeluruh, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Pengawasan yang efektif membutuhkan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan pemerintah daerah. Koordinasi ini penting untuk memastikan

semua peraturan yang berlaku dapat diimplementasikan secara efektif dan pelanggaran dapat ditindak dengan tegas.

Salah satu masalah utama dalam pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Mengawasi ribuan kendaraan dan pengemudi yang beroperasi setiap hari membutuhkan sistem yang canggih serta tenaga kerja yang terlatih. Namun, banyak daerah di Indonesia masih mengalami kekurangan petugas pengawas dan teknologi yang diperlukan untuk memantau operasional layanan transportasi online secara efektif. Akibatnya, pelanggaran seperti penggunaan kendaraan yang tidak terdaftar, pelanggaran tarif, dan ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan sering kali tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan cepat.

Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah proses hukum yang lambat dan birokratis. Ketika terjadi pelanggaran, proses penindakan bisa memakan waktu lama, mulai dari tahap investigasi hingga pengambilan keputusan hukum. Selain itu, kesenjangan antara peraturan yang ada dan pelaksanaannya di lapangan membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Pengemudi atau perusahaan yang melanggar peraturan sering kali dapat menghindari sanksi yang seharusnya diterapkan.

Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi oleh pengemudi dan perusahaan transportasi online juga menjadi masalah. Sosialisasi mengenai regulasi dan kewajiban hukum bagi penyedia layanan dan pengemudi masih perlu ditingkatkan. Banyak pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman mengenai peraturan yang berlaku. Pemerintah perlu mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam layanan transportasi online memahami dan mematuhi peraturan yang ada.

Pengawasan yang kurang efektif dapat berdampak negatif pada keamanan dan kenyamanan penumpang. Kasus-kasus pelanggaran keselamatan, penipuan tarif, atau perilaku tidak etis dari pengemudi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi online. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan responsif. Pemerintah dan penyedia layanan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap keluhan atau insiden yang dilaporkan oleh penumpang dapat ditangani dengan cepat dan tuntas.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pengawasan. Dengan memanfaatkan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti GPS tracking dan aplikasi pengaduan online, pemerintah dapat memantau operasional layanan transportasi online secara real-time dan lebih efektif. Data yang dikumpulkan dari teknologi ini dapat digunakan untuk melakukan analisis mendalam mengenai pola pelanggaran dan mengambil langkah preventif yang tepat. Teknologi ini juga memungkinkan penanganan keluhan dan pelanggaran secara lebih efisien.

Perusahaan penyedia layanan seperti Grab juga memiliki peran penting dalam pengawasan internal. Mereka harus memastikan bahwa semua pengemudi yang tergabung dalam platform mereka mematuhi standar dan peraturan yang ditetapkan. Ini termasuk pelatihan rutin, evaluasi kinerja, dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan pengawasan internal yang ketat, perusahaan dapat membantu mengurangi beban pengawasan dari pihak pemerintah dan memastikan bahwa layanan yang mereka tawarkan tetap aman dan berkualitas.

Secara keseluruhan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap layanan transportasi online memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Semua pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan penyedia layanan, pengemudi, hingga penumpang, harus berperan aktif dalam menciptakan sistem transportasi online yang aman, adil, dan teratur. Dengan pengawasan yang lebih baik dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan layanan transportasi online di Indonesia dapat berkembang dengan lebih sehat dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dampak regulasi dan pengawasan terhadap Grab dan Para Penggunanya

Regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap layanan transportasi online seperti Grab memiliki berbagai dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap perusahaan, pengemudi, dan para pengguna. Regulasi yang diterapkan dengan baik dapat menciptakan lingkungan operasional yang lebih aman dan adil, sementara pengawasan yang kurang efektif dapat menimbulkan berbagai masalah.

1. Dampak terhadap Grab sebagai Perusahaan

Bagi Grab, regulasi yang ketat memerlukan penyesuaian operasional dan manajerial. Perusahaan harus memastikan semua kendaraan dan ngemudi yang tergabung dalam platformnya memenuhi standar teknis dan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk persyaratan lisensi, uji KIR untuk kendaraan, dan pelatihan bagi pengemudi. Selain itu, perusahaan juga harus menyesuaikan tarif sesuai dengan batas atas dan bawah yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat mempengaruhi strategi harga dan margin keuntungan mereka.

Implementasi teknologi untuk mematuhi regulasi, seperti sistem GPS dan aplikasi pengaduan online, membutuhkan investasi yang signifikan. Namun, investasi ini juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Regulasi yang mengharuskan perlindungan data pribadi juga mendorong Grab untuk meningkatkan sistem keamanan informasi mereka, sehingga dapat memperkuat kepercayaan pengguna terhadap platform.

2. Dampak terhadap Pengemudi Grab

Pengemudi Grab, sebagai mitra independen, juga merasakan dampak dari regulasi dan pengawasan yang diterapkan. Persyaratan lisensi dan sertifikat uji KIR menambah beban administratif dan finansial bagi pengemudi. Namun, dengan adanya regulasi yang ketat terkait keselamatan dan standar layanan, pengemudi yang mematuhi peraturan dapat menikmati lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih teratur.

Regulasi yang mengatur status hukum pengemudi sebagai mitra independen, bukan karyawan, memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ini memberikan fleksibilitas bagi pengemudi dalam menentukan waktu dan frekuensi kerja. Di sisi lain, ketidakjelasan mengenai perlindungan sosial dan manfaat lainnya sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pengemudi. Oleh karena itu, inisiatif untuk menyediakan asuransi dan manfaat tambahan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi.

3. Dampak terhadap Pengguna Layanan

Bagi pengguna layanan Grab, regulasi dan pengawasan yang ketat dapat meningkatkan kualitas dan keamanan layanan yang diterima. Dengan adanya standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah, pengguna dapat merasa lebih aman saat menggunakan layanan transportasi online. Perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang juga memastikan bahwa pengguna memiliki akses ke informasi yang jelas dan akurat mengenai tarif, rute, dan layanan.

Namun, regulasi tarif yang ketat dapat berdampak pada fleksibilitas harga yang ditawarkan oleh Grab. Batas atas dan bawah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menawarkan diskon atau promosi, yang mungkin disukai oleh pengguna. Meskipun demikian, regulasi tarif ini penting untuk mencegah praktik predatory pricing dan memastikan persaingan yang sehat di pasar.

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Secara sosial dan ekonomi, regulasi dan pengawasan yang efektif terhadap layanan transportasi online dapat memberikan manfaat yang luas. Regulasi yang memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi online. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah pengguna dan memperluas pasar, yang menguntungkan perusahaan seperti Grab serta menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi pengemudi.

Pengawasan yang baik juga dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi transportasi perkotaan. Dengan adanya regulasi yang mengatur penggunaan kendaraan dan zona operasi, diharapkan dapat tercipta sistem transportasi yang lebih teratur dan terintegrasi. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna layanan, tetapi juga oleh masyarakat luas yang dapat menikmati lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan efisien.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak regulasi dan pengawasan terhadap layanan transportasi online seperti Grab sangat luas dan kompleks. Meskipun ada tantangan dalam implementasi dan penyesuaian, regulasi yang diterapkan dengan baik dapat menciptakan lingkungan operasional yang lebih aman, adil, dan efisien. Bagi Grab, pengemudi, dan pengguna, regulasi yang efektif memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang diperlukan untuk perkembangan industri transportasi online yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat menikmati manfaat maksimal dari perkembangan teknologi transportasi ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji regulasi dan pengawasan terhadap layanan transportasi online dengan studi kasus Grab di Indonesia. Regulasi layanan transportasi online diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan menjaga keamanan serta kenyamanan penumpang. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pengawasan terhadap layanan transportasi online masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai serta proses penegakan hukum yang lambat dan birokratis. Meskipun demikian, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, perusahaan seperti Grab juga memiliki peran penting dalam pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dampak regulasi dan pengawasan terhadap Grab sebagai perusahaan, pengemudi, dan pengguna layanan cukup signifikan. Bagi Grab, regulasi memerlukan penyesuaian operasional dan manajerial serta investasi dalam teknologi. Pengemudi harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, namun regulasi ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Bagi pengguna layanan, regulasi dan pengawasan meningkatkan kualitas dan keamanan layanan yang diterima, meskipun membatasi fleksibilitas tarif.

Secara keseluruhan, regulasi dan pengawasan yang efektif dapat menciptakan lingkungan operasional yang lebih aman, adil, dan efisien, memberikan manfaat yang luas bagi perusahaan, pengemudi, dan pengguna layanan serta masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik, M., Mansur, A., & Gultom, E. (2008). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informas*. Jakarta: Refika Aditama.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2009). *Law and Society in Transition: Toward esponsive Law*. Jakarta: Nusamedia.
- Nugraha, A. (2020). *Organisasi Ojol: Ada 4 Juta Driver Ojol Di Indonesia*. Retrieved from Kumparan:
<https://kumparan.com/kumparantech/organisasi-ojol-ada-4-juta-driverojol-di-indonesia>
1tBrZLEXOEI
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Desy Setyowati, “Nadiem Makarim Klaim Go-Jek Punya 20 Juta Pengguna”, 2018, (<https://katadata.co.id/berita/2018/04/26/nadiem-makarim-klaim-gojek-punya-20-juta-pengguna>).
- Kustin Ayuwuragil, “Aturan Transportasi Online Sudah Mapan di Eropa”, 2017, (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171011104914-384247628/aturan-transportasi-online-sudahmapandi-eropa>).
- Sovia Hasanah, “Ini Syarat Agar Transportasi Online Boleh Beroperasi di Bandara”, 2015, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585055e2da50c/ini-syarat-agartransportasi-onlineboleh-beroperasi-dibandara>).
- Terry Muthahhari, “Di Eropa, Uber adalah Perusahaan Taksi”, 2017, (<https://tirto.id/di-eropa-uberadalah-perusahaan-taksicCkh>).
- Agus Raharjo, *Ringkasan Disertasi: Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)*, 2008.